





PERWAKILAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR

  PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	<b>NOMOR SOP</b>	/TI.03/J1/2024
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	1 September 2024
	<b>TGL. REVISI</b>	1 September 2024
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 September 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	KEPALA    Dra. Maria Ernawati, MM NIP. 19660211 19920320 2 001
<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP Uji Konsekuensi</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di BKKBN.	1. Pejabat PPID Bidang Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi; 2. Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi sumber informasi yang menjadi informasi yang dikecualikan; 3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer, Microsoft Office, dan mampu mengoperasikan SIMSDM.	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
SOP Informasi Publik yang lainnya	Komputer/Laptop, Jaringan Internet, Printer	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	

Pemilik SOP : Tim Kerja Pelaporan Statistik dan Pengelolaan TIK

### SOP UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris PPID Pelaksana	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris PPID	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat usulan informasi Yang Dikecualikan menyerahkan kepada Ketua PPID Pelaksana BKKBN Jawa Timur untuk dibuatkan surat usulan	mulai					Data dan Informasi	2 hari kerja	Usulan DIK	
2	Membuat usulan informasi Yang Dikecualikan atau Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) dan menyerahkan kepada Sekretariat PPID						Data dan Informasi	4 hari kerja	Surat Usulan DIK	
3	Menerima dan memverifikasi usulan DIK yang berasal dari Pelaksana PPID						Usulan DIK	60 menit	surat pengantar uji konsekuensi	
4	Memerintahkan Sekretaris PPID Utama untuk menyelenggarakan rapat uji konsekuensi						Surat pengantar uji konsekuensi	60 menit	disposisi, tanggal rapat	
5	Sekretaris PPID Utama menyelenggarakan rapat uji konsekuensi dipimpin PPID Utama. Sekretariat PPID mengecek kelengkapan usulan informasi yang dikecualikan dan merekomendasikan tindak lanjut usulan tersebut kepada PPID Utama						disposisi, tanggal rapat	2 hari kerja	undangan uji konsekuensi	
6	Membuat dan menyerahkan Draft dan menyerahkan Draft Surat Penetapan Klasifikasi serta melampirkam lembar Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama						undangan uji konsekuensi	1 hari kerja	notulen rapat, absensi, BA Uji konsekuensi	
7	Menyerahkan Draft Surat Penetapan Klasifikasi atas hasil Uji Konsekuensi yang telah dilakukan kepada Atasan PPID						lembar pengujian konsekuensi, uji konsekuensi	1 hari kerja	lembar pengujian konsekuensi, pertimbangan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris PPID Pelaksana	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris PPID	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memberikan persetujuan atas draft Surat Penetapan Klasifikasi dan Lembar Pengujian Konsekuensi					↓ □	draft DIK	1 hari kerja	persetujuan tertulis	
9	Menyusun surat penetapan klasifikasi atas hasil uji konsekuensi yang telah disetujui Atasan PPID			□			persetujuan tertulis	1 hari kerja	draft surat penetapan	
10	Memberikan paraf terhadap Surat Penetapan Klasifikasi dan lembar Pengujian Konsekuensi					□	draft surat penetapan	1 hari kerja	draft penetapan, otorisasi atasan PPID	
11	Menandatangani Surat Penetapan klasifikasi dan lembar Pengujian Konsekuensi				□		draft surat penetapan	1 hari kerja	surat penetapan klasifikasi	
12	Menyampaikan Surat Penetapan klasifikasi dan lembar Pengujian Konsekuensi kepada PPID Pelaksana untuk dijadikan pedoman tentang Informasi yang Dikecualikan di BKKBN		↓ □ selesai				draft surat penetapan	1 hari kerja	surat penetapan klasifikasi	